

2020



LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung | Jl. Cianjur No. 34 Bandung

Kata Pengantar

Dengan segala kerendahan hati kami menyajikan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung Tahun 2020. Laporan ini menyajikan kinerja DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2020 yang mencakup hasil-hasil yang telah dicapai, analisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Pada Tahun 2020 yang merupakan tahun ketiga periode Rencana Strategis, kami melaporkan pengukuran kinerja atas 4 indikator kinerja yang dapat diukur kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tersebut menunjukkan DPMPTSP Kota Bandung telah mencapai 100% target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sesuai dengan target dalam Rencana Strategis. Ke depan, kami akan melakukan berbagai perbaikan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya para pemohon izin dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam urusan penanaman modal.

Kami telah melakukan inovasi dan perbaikan dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Bandung dan perbaikan proses pelayanan perijinan agar pelayanan perijinan mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan. Kami akan melanjutkan inovasi dan perbaikan yang telah kami lakukan dalam rangka pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Bandung sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2018-2023.

Kami akan terus memantau pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Bandung. Hanya dengan memantau pencapaian kinerja kami dapat mengetahui kemampuan kami dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, dan meyakinkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang efektif dan efisien.

Bandung, 29 Januari 2021





Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2020 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Wali Kota Bandung dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung untuk meningkatkan kinerja



Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2020 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.



Pada Tahun 2020 setelah dilakukan Review bersama Bagian ORPAD dan tim reviu RENSTRA DPMPTSP, ditetapkan 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja yang harus dicapai.

Dari 4 indikator kinerja yang dapat diukur kinerjanya secara utuh, sebanyak 4 indikator kinerja (100%) telah mencapai bahkan melampaui target. Empat indikator yang sudah mencapai target diantaranya adalah Indikator Nilai Investasi dan indikator rata-rata waktu respon pengaduan, Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Rata-Rata waktu layanan izin. Dalam rangka menerapkan pelaksanaan OSS (online single submission) sesuai amanat peraturan perundang-undangan maka dilakukan integrasi sistem GAMPIL dengan MANTRA (aplikasi dari Kemenkominfo). Selama proses pengintegrasian sistem, pelayanan perizinan yang diwajibkan melalui OSS untuk sementara ditutup terlebih dahulu. Penutupan pelayanan tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan belasan ribu berkas pada sistem pelayanan perizinan online. Guna menghadapi hambatan tersebut DPMPTSP melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Optimalisasi percepatan pelayanan untuk memverifikasi berkas-berkas yang sudah masuk ke sistem;
2. Melaksanakan BIMTEK (Bimbingan Teknis) kaitan pemahaman layanan secara online melalui sistem OSS;
3. Mengundang narasumber dari Kementrian terkait untuk mensosialisasikan pelayanan OSS.

Guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sesuai Rencana Strategi DPMPTSP, akan dilakukan berbagai upaya yang berkelanjutan, antara lain :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya dengan melakukan pelatihan penanganan pelayanan perizinan dengan diberlakukannya *Online Single Submission (OSS)* kepada pegawai dilingkungan DPMPTSP Kota Bandung;
2. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya dengan melakukan up grade system aplikasi;

3. Perbaikan sistem pengendalian internal pelayanan perizinan, dengan melakukan penyempurnaan peraturan internal tentang SOP, ISO, serta menjaga kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang telah sesuai dengan standar Ombudsman RI (ORI) di lingkungan DPMPTSP Kota Bandung;
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal;



5. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset Dinas, diantaranya dengan melakukan cascading dari mulai eselon 2 sampai eselon 4 dan dilanjutkan dengan pertanggung jawaban kinerja ke pelaksana dengan membuat Indikator Kinerja Individu (IKI).

Sebagai langkah nyata dari upaya perbaikan berkelanjutan tersebut, DPMPTSP merespon setiap pengaduan dalam waktu kurang dari dua jam dan penyelesaian izin lebih cepat dari SOP yang ditetapkan dimana berkas izin selesai dalam waktu rata-rata 3 sampai 4 hari (khusus izin yang tidak menggunakan persyaratan teknis dari OPD teknis). Selain itu juga DPMPTSP konsisten bekerjasama dengan PT Pos Indonesia dalam pengiriman berkas izin yang telah selesai.





Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Gambaran Umum DPMPTSP Kota Bandung I-1
1.1.1.	Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi I-1
1.1.2.	Fungsi I-1
1.1.3.	Struktur Organisasi I-2
1.2	Isu-isu Strategis Organisasi I-4
1.3	Sistematika Laporan Kinerja I-5
1.4	Landasan Hukum I-6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
2.1	Rencana Strategis II-9
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama III-17
3.2	Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja III-18
3.3	Akuntabilitas Keuangan III-54
3.4	Prestasi III-45
BAB IV	PENUTUP IV-58



1.1. GAMBARAN UMUM DPMPTSP KOTA BANDUNG

1.1.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

1.1.2. FUNGSI



Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya;

1.1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - c. Sub Bagian Data, Informasi dan Evaluasi.
- c) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal;
 3. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal

- d) Bidang Advokasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Seksi Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Pengawasan Penanaman Modal;
 - 3. Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
- e) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A1;
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A2.
- f) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B1;
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B2.
- g) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C1;
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C2.
- h) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D1;
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D2.
- i) UPT; dan
- j) Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



1.2. ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI

Penentuan Visi dan Misi suatu organisasi sangat ditentukan oleh identifikasi isu-isu strategis. Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah bersama mendesak, mempunyai pengaruh secara luas terhadap pencapaian tujuan bersama dan dapat dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan suatu organisasi. Isu strategis bisa berupa kelemahan, permasalahan, tantangan dan peluang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung merupakan lembaga penyelenggara penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Bandung. DPMPTSP Kota Bandung dituntut dapat memberikan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang cepat, akurat, dengan biaya sesuai ketentuan, secara transparan kepada masyarakat Kota Bandung. Apabila diidentifikasi secara cermat dan dirumuskan ada beberapa isu strategis di DPMPTSP, yang kemudian diurutkan.

Beberapa isu yang muncul dan dihadapi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima tersebut antara lain sebagai berikut:

1. DPMPTSP Kota Bandung adalah dinas yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Sebagian besar perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP, sangat tergantung pada rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah lain. Proses pemberian rekomendasi teknis ini masih menjadi kendala dalam pelayanan perizinan, terutama ketepatan waktu;
2. Kurangnya informasi tentang pengurusan izin kepada masyarakat;
3. Perubahan kewenangan pengurusan izin di bidang kesehatan, dimana sejak diberlakukannya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 023 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Kota Bandung kewenangan perizinan di bidang kesehatan dikelola oleh Bidang Perizinan C DPMPTSP Kota Bandung;
4. Berdasarkan Surat Edaran Kemenpan-RB Nomor 393 tahun 2019 mengenai langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi, DPMPTSP sebagai institusi penyelenggara urusan penanaman modal juga harus menyederhanakan struktur birokrasinya dimana pejabat struktural eselon IV statusnya berubah menjadi jabatan fungsional.
5. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya memuat tentang Percepatan Perizinan Berusaha untuk mendorong peningkatan investasi maka regulasi yang berkaitan dengan perizinan mengalami perubahan, sehingga dinas terkait khususnya DPMPTSP harus melakukan penyesuaian Regulasi mengacu pada UU tersebut

1.3. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2020 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung yang terdiri dari Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, isu-isu strategis, sistematika laporan kinerja, dan landasan hukum.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran dan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi uraian mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2020.

BAB IV PENUTUP

Berisi ringkasan pencapaian kinerja, hambatan dan kendala dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.4. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2007 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung ;

- n. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;
- o. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- p. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perijinan;
- q. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
- r. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;
- s. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah
- t. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu;
- u. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 023 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
- v. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 024 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi dan Misi Pemerintah Kota dicapai melalui kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka Visi dan Misi Pemerintah Kota merupakan Visi dan Misi OPD.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, yaitu:



**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

Bandung : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.

Unggul : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.

Nyaman : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap

Matrik Renstra dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Matrik Renstra

No	Misi	Kategori	Indikator Kinerja Utama	Tahun Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Ekonomi	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	5,2%	5,5%	5,8%	6,1%	6,4%
2	Meningkatkan kualitas lingkungan	Lingkungan Hidup	Persentase Ruang Terbuka Hijau	30%	32%	34%	36%	38%
3	Meningkatkan pelayanan publik	Pelayanan Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat	85%	87%	89%	91%	93%
4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Sumber Daya Manusia	Persentase Penduduk Berpendidikan Tinggi	15%	16%	17%	18%	19%

Indikator Tujuan :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KEBERHASILAN TUJUAN
Meningkatnya kualitas dan kinerja DPMPTSP dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Capaian nilai IKM pada akhir periode Renstra DPMPTSP (80.25)
	2. Rata-rata waktu layanan izin	2 Rata-rata waktu layanan izin (7 hari kerja)
	3. Rata-rata waktu respon pengaduan	3 Rata-rata waktu respon pengaduan pada akhir periode Renstra (3 jam)
	4. Nilai investasi berskala nasional	4 Terwujudnya nilai investasi pada akhir periode RENSTRA DPMPTSP (7.12 triliun rupiah)

2.2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 setelah review oleh Bagian ORPAD dan Bidang Andalev Bappelitbang ditetapkan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat
- 2) Rata-rata Waktu Layanan Izin
- 3) Rata-rata Waktu Respon Penyelesaian Pengaduan
- 4) Nilai investasi berskala nasional

Hal tersebut sejalan dengan tugas pokok DPMPTSP Kota Bandung yaitu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP ditetapkan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 900/105.4-DPMPTSP Tanggal 31 Januari 2020.

1.2.3 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan salah satu target Kota Bandung mempertahankan nilai SAKIP kategori “A”, maka seluruh PERANGKAT DAERAH melakukan asistensi dan validasi materi Perjanjian Kinerja bersama Bidang Andalev Bappelitbang dan Bagian ORPAD Setda Kota Bandung. Setelah dilakukan review dan asistensi, maka DPMPTSP ditetapkan untuk merubah (dua) indikator pada sasaran strategis 1 (satu), yaitu “Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan terpadu” dan menambahkan 1 (satu) sasaran strategis baru yaitu “Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi” beserta 1 (satu) indikator kinerjanya.

Berikut Tabel 2.7. merupakan uraian sasaran strategis, indikator kinerja DPMPTSP berdasarkan Perjanjian Kinerja setelah review:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.19	Program Pelayanan Perizinan
		Rata-rata waktu layanan izin	7 hari	Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
		Rata-rata Waktu Respon Pengaduan	3 jam	Sosialisasi/Publikasi Pelayanan Perijinan
				Penyusunan / Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan PPTSP				
2	Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif dan Kemudahan Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional	5.65 Triliun	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
				Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
				Penyusunan studi kelayakan penanaman modal
				Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
				Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal
				Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi
				Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal
				Peningkatan Kepatuhan Penanaman Modal
Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Perizinan				

2.3 PERENCANAAN KEUANGAN

Dalam satu tahun anggaran, seluruh Perangkat Daerah diberikan kesempatan untuk merencanakan kembali pagu anggaran yang sudah ditetapkan melalui anggaran perubahan. Berikut uraian anggaran perubahan berdasarkan DPA DPMPSTP Tahun 2020

:

Tabel 2.8
Rincian Pagu DPA Tahun 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
BELANJA	36,838,635,548.00	33,796,121,624.00	-3,042,513,924.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	19,903,464,057.74	16,800,960,133.51	-3,102,503,924.23
Belanja Pegawai	19,903,464,057.74	16,800,960,133.51	-3,102,503,924.23
BELANJA LANGSUNG			
Program Pelayanan Administrasi	3,446,976,540	3,083,268,040	-363,708,500
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274,443,600	353,547,750	79,104,150
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	261,000,000	152,700,000	-108,300,000
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	610,016,910	550,304,410	-57,712,500
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	568,833,000	570,701,150	1,868,150
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,958,000	14,882,000	-11,076,000
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38,463,030	38,463,030	0
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	32,500,000	32,500,000	0

LAPORAN KINERJA DPMPSTP KOTA BANDUNG | Tahun 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	132,593,000	115,000,700	-17,592,300
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	422,695,000	172,695,000	-250,000,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	268,890,000	268,890,000	0
Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	456,516,000	456,516,000	0
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	355,068,000	355,068,000	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,782,628,150	2,868,448,029	85,819,879
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	330,436,150	330,436,150	0
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	452,192,000	697,583,300	245,391,300
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DID)	2,000,000,000	1,840,428,579	-159,571,421
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	84,730,800	0	-84,730,800
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	84,730,800	0	-84,730,800
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	93,200,000	8,000,000	-85,200,000
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	93,200,000	8,000,000	-85,200,000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2,242,190,000	2,521,023,757	278,833,757
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal (DID)	2,242,190,000	1,843,533,757	-398,656,243
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal (DID Tambahan)	0	677,490,000	677,490,000

LAPORAN KINERJA DPMPSTP KOTA BANDUNG | Tahun 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	2,175,370,900	1,740,446,136	-433,924,764
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal (DID)	966,139,500	842,707,370	-123,432,130
Kegiatan Penyusunan studi kelayakan penanaman modal (DID)	1,209,231,400	897,738,766	-311,492,634
Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi	775,432,000	576,891,497	-198,540,503
Kegiatan Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal (DID)	438,372,000	348,503,905	-89,868,095
Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Penanaman Modal (DID)	177,360,000	144,129,108	-33,230,892
Kegiatan Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Perizinan (DID)	159,700,000	84,258,484	-75,441,516
Program Pelayanan Perizinan	5,334,643,100	6,197,084,032	862,440,932
Kegiatan Penyusunan/ Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum	58,750,000	0	-58,750,000
Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan PPTSP (DID)	74,036,000	219,310,947	145,274,947
Kegiatan Sosialisasi/Publikasi Pelayanan Perijinan (DID)	316,927,900	394,427,395	77,499,495
Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman modal dan Pelayanan perijinan (DID)	4,884,929,200	4,260,835,690	-624,093,510
Kegiatan Sosialisasi/Publikasi Pelayanan Perijinan (DID Tambahan)	0	694,542,000	694,542,000
Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman modal dan Pelayanan perijinan (DID Tambahan)	0	627,968,000	627,968,000



3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang digunakan oleh organisasi untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setelah review oleh Bidang Andalev Bappelitbang dan Bagian ORPAD Setda Kota Bandung, DPMPTSP Kota Bandung ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Bandung. Dari hasil pengukuran kinerja, sebanyak (empat) Indikator Kinerja (100%) telah mencapai atau melampaui target. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja maka ringkasan pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2020 adalah sebagaimana disajikan pada Grafik 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Pencapaian Sasaran

NO	TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN							
	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (<100%)	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Sasaran 1	3	3	100	0	0	0	0
2	Sasaran 2	1	1	100	0	0	0	0
Jumlah		4	4	100	0	0	0	0

Pada tahun 2020, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) Sasaran Strategis dengan menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dari 4 indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja (100%) mencapai bahkan melampaui target.

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2018-2023. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2020.

3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN

KINERJA A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{([2 \times \text{Rencana}] - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

DPMPTSP Kota Bandung melaksanakan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja, yang disusun sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Suasana Asistensi Cascading Perjanjian Kinerja bersama Asisten Deputi KemenPAN-RB

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan.



Gambaran isi LKIP

Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan

Sosialisasi Perizinan Online dan Workshop LKPM Online (Hotel Ibis Trans Studio Bandung)



dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung diukur dengan membandingkan pencapaian indikator kinerja dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2020. Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2020 adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2020 DPMPTSP Kota Bandung setelah review oleh Bidang Andalev Bappelitbang dan Bagian ORPAD Setda Kota Bandung.

SASTRA I**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan Terpadu**

Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) sebanyak 3 Indikator Kinerja, sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja (100%) telah mencapai target.

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1 (satu) “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan Terpadu” diukur menggunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Uraian target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI Th 2019	REALISASI Th 2020	TARGET Th 2020	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM	80,3	80,43	80,19	100,30% √	80,25
2	Rata-rata Waktu Layanan Izin	5 hari kerja	3 hari kerja	7 hari kerja	157,14% √	7 hari
3	Rata-rata Waktu Respon Pengaduan	2,43 jam	1,55 jam	3 jam	148,33% √	3 jam

Ket: √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, N/A = not available

Deskripsi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Pelayanan perizinan pada DPMPTSP adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan, dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi, dan pertanahan, bina marga, sumber daya air, dan lingkungan hidup, komunikasi dan informasi serta perhubungan.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk

menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey secara langsung terhadap setiap pemohon izin. Setiap pemohon yang akan mengambil izin diwajibkan menekan tombol survey indeks kepuasan masyarakat meliputi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut :

- 1) **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- 2) **Persyaratan Pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- 3) **Kejelasan petugas pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
- 4) **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) **Tanggung jawab petugas pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
- 6) **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- 7) **Kecepatan pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

- 8) **Keadilan mendapatkan pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- 9) **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- 10) **Kewajaran biaya pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
- 11) **Kepastian biaya pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- 12) **Kepastian jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 13) **Kenyamanan lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- 14) **Keamanan Pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Selama penyelenggaraan perizinan DPMPTSP mendapatkan nilai IKM yang tinggi. Ketika melakukan asistensi muncul asumsi bahwa pada saat masyarakat pemohon merasa puas secara logis akan terjadi penurunan terhadap pengaduan yang berupa komplain, sebab komplain merupakan bentuk nyata adanya ketidakpuasan pelanggan. Tingginya IKM juga mengindikasikan bahwa layanan perijinan DPMPTSP sudah sesuai dengan waktu yang dijanjikan dalam SOP penyelenggaraan perizinan. Dengan penerapan pelayanan secara online, maka terdapat beberapa variabel pada 14 indikator penilaian IKM yang sudah tidak sesuai dengan kondisi pelayanan online (mengingat tidak adanya pertemuan antara pemberi layanan dengan penerima layanan). Berdasarkan hasil konsultasi bersama Kemenpan RB untuk mengukur IKM dalam penyelenggaraan pelayanan secara online ditetapkan tujuh indikator variabel untuk mengukur IKM yaitu :

1. Sistem, Mekanisme, Prosedur Pelayanan
2. Persyaratan Pelayanan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk/Jenis Layanan
6. Kompetensi/Pengetahuan Petugas Layanan
7. Maklumat Layanan

Dengan tersedianya data IKM, Rata-rata Waktu Layanan Izin, dan Rata-rata Waktu Respon Pengaduan Secara Periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

- 1) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 2) Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan secara periodik;
- 3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
- 4) Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
- 5) Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- 6) Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Uraian Kinerja Tahun 2020

Uraian realisasi dan capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan Terpadu” adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja I.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

Target tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan terpadu pada DPMPTSP Kota Bandung sebesar 80,19 atau kategori “Baik”. Pada tahun 2020, dari hasil survey IKM, kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan perizinan terpadu DPMPTSP Kota Bandung sebesar **80,43** atau mencapai **100,30 %** dari target tahun 2020.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara online dengan program aplikasi “GAMPIL” melalui alamat website resmi DPMPTSP Kota Bandung yaitu www.dpmpptsp.bandung.go.id”.

Gambar 3.1
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara *online* dengan program aplikasi Hayu.Bandung

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Periode:	s/d	Proses
1. Jenis Izin			
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Cek Semuanya</i>			
1.	√	Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C	
2.	√	Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan D	
3.	√	Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C	
4.	√	Izin Apotek	
5.	√	Izin Operasional Klinik Pratama	
6.	√	Izin Operasional Klinik Utama	
7.	√	Izin Apoteker	
8.	√	Izin Tenaga Teknis Kefarmasian	
9.	√	Izin Radiografer	
10.	√	Izin Penata Anestesi	
11.	√	Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
12.	√	Izin Refraksionis Optisien	
13.	√	Izin Perekam Medis	
14.	√	Izin Teknisi Gigi	
15.	√	Izin Program Pendidikan Dokter Spesialis	
16.	√	Izin Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis	

17. ✓ Izin Praktik Mandiri Dokter Spesialis
18. ✓ Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi
19. ✓ Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi Spesialis
20. ✓ Izin Praktik Mandiri Bidan
21. ✓ Izin Perawat
22. ✓ Izin Fisioterapis
23. ✓ Izin Okupasi Terapis
24. ✓ Izin Tenaga Gizi
25. ✓ Izin Praktik Mandiri Ortotis Prostetis
26. ✓ Izin Terapis Gigi dan Mulut
27. ✓ Izin Terapis Wicara
28. ✓ Izin Tukang Gigi
29. ✓ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
30. ✓ Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
31. ✓ Izin Optikal
32. ✓ Izin Toko Alat Kesehatan
33. ✓ Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
34. ✓ Izin Salon Kecantikan
35. ✓ Izin Operasional Klinik Radiologi
36. ✓ Izin Operasional Klinik Dialisis
37. ✓ Izin Operasional Laboratorium Klinik Pratama
38. ✓ Izin Elektromedis
39. ✓ Izin Dokter Umum
40. ✓ Izin Dokter Spesialis
41. ✓ Izin Dokter Gigi
42. ✓ Izin Dokter Gigi Spesialis
43. ✓ Izin Bidan
44. ✓ Izin Ortotis Prostetis
45. ✓ Izin Praktik Mandiri Fisioterapis
46. ✓ Izin Praktik Mandiri Okupasi Terapis
47. ✓ Izin Praktik Mandiri Tenaga Gizi
48. ✓ Izin Praktik Mandiri Terapis Gigi dan Mulut
49. ✓ Izin Praktik Mandiri Terapis Wicara
50. ✓ Izin Praktik Mandiri Perawat
51. ✓ Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT
52. ✓ Izin Sanitarian

53. ✓ Izin Psikolog Klinis
54. ✓ Izin Optometris
55. ✓ Izin Praktik Mandiri Psikolog Klinis
56. ✓ Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
57. ✓ Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga
58. ✓ Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan / Restoran
59. ✓ Sertifikat Laik Sehat Hotel
60. ✓ Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang
61. ✓ Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit
62. ✓ Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
63. ✓ Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Jasa Usaha
64. ✓ Izin Lingkungan
65. ✓ Izin Mendirikan Bangunan Lokal 1 s/d 2 lantai
66. ✓ Izin Mendirikan Bangunan Lokal 3 lantai
67. ✓ Izin Mendirikan Bangunan lokal Rumah Ibadat
68. ✓ Izin Menara Telekomunikasi
69. ✓ Izin Usaha Industri
70. ✓ Izin Usaha Jasa Konstruksi
71. ✓ Izin Usaha Perdagangan Umum
72. ✓ Izin Usaha Perdagangan (Usaha Toko Swalayan yang Berdiri Sendiri)
73. ✓ Izin Usaha Perdagangan (Usaha Toko Swalayan yang Terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Bangunan/Kawasan Lain)
74. ✓ Izin Usaha Perdagangan (Usaha Pusat Perbelanjaan)
75. ✓ Tanda Daftar Gudang
76. ✓ Izin Koperasi Simpan Pinjam
77. ✓ Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
78. ✓ Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
79. ✓ Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
80. ✓ Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
81. ✓ Izin Usaha Toko Modern
82. ✓ Izin Khusus Waktu Pelayanan (Bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern)
83. ✓ Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
84. ✓ Tanda Daftar Usaha Pariwisata
85. ✓ Izin Usaha Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan

86. ✓ Izin Operasional / Komersial Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal
87. ✓ Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan
88. ✓ Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
89. ✓ Izin Usaha Pemotongan Hewan
90. ✓ Izin Praktik Dokter Hewan
91. ✓ Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
92. ✓ Izin Pengelolaan Tempat Parkir
93. ✓ Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
94. ✓ Kartu Pengawasan Angkutan Orang Dalam Trayek
95. ✓ Izin Operasional Bengkel Tertunjuk
96. ✓ Izin Operasional Bengkel Umum
97. ✓ Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan Dan Perbaikan Kapal
98. ✓ Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
99. ✓ Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
100. ✓ Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil
101. ✓ Izin Mendirikan Bangunan Lokal Non Rumah Tinggal ≤ 4 Lantai Bangunan Pemerintah
102. ✓ Izin Mendirikan Bangunan Lokal Non Rumah Tinggal > 4 Lantai Bangunan Pemerintah
103. ✓ Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen di Halaman (Persil) dan di Bangunan
104. ✓ Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen di Bahu jalan/Berm jalan/Trotoar, Jembatan, Jalan layang, Jalan Tol, Jembatan Kereta Api dan Shelter
105. ✓ Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen di Taman
106. ✓ Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen di Jembatan penyeberangan Orang dan Bando Jalan
107. ✓ Izin Penyelenggaraan Reklame Kendaraan
108. ✓ Izin Usaha Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal
109. ✓ Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan
110. ✓ Izin Lingkungan untuk Pemerintah
111. ✓ Izin Mendirikan Bangunan Splitzing Non Rumah Tinggal Lokal
112. ✓ Izin Operasional / Komersial Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
113. ✓ Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal ≤ 4 Lantai
114. ✓ Izin Mendirikan Bangunan untuk NON Rumah Tinggal ≥ 10000 m² dan SPBU
115. ✓ Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal Tanpa TKPRD
116. ✓ Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama

- 117. ✓ Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama
- 118. ✓ Izin Toko Obat
- 119. ✓ Izin Panti Sehat Berkelompok
- 120. ✓ Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler
- 121. ✓ Izin Pusat Kesehatan Masyarakat
- 122. ✓ Salinan Izin Mendirikan Bangunan Terbit Sebelum Agustus 2015 (Non Online)

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 7 (tujuh) variabel sesuai dengan acuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat yang disesuaikan dengan penyelenggaraan pelayanan online. Realisasi IKM sebesar 80.43 didapat dari perhitungan rata-rata empat belas indikator yang dihitung dalam aplikasi, dimana angka yang tertera pada aplikasi dikonversikan kesatuan indeks. Adapun hasil survey kepuasan pelanggan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2.
Tampilan Hasil Survey IKM pada Website Resmi DPMPTSP
(dpmptsp.bandung.go.id)

Nomor	Indikator	Nilai	Indeks	Grade
1	Perayanan	76,9	3,16	B - BAIK
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	76,79	3,15	B - BAIK
3	Waktu Penyelesaian	76,30	3,14	B - BAIK
4	Biaya/Tarif Pelayanan	82,85	3,31	B - BAIK
5	Prosedur Spesifikasi Jenis Layanan	80,83	3,23	B - BAIK
6	Pertanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	81,11	3,24	B - BAIK
7	Sarana dan Prasarana	81,08	3,24	B - BAIK
8	Ketersediaan Informasi	81,48	3,26	B - BAIK
Total (14000 Pemohon)		80,43	3,22	B - BAIK

Tabel 3.2.
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI	KATEGORI
1	Prosedur Pelayanan	78,79	Baik
2	Persyaratan Pelayanan	78,90	Baik
3	Waktu Pelayanan	78,38	Baik
4	Biaya/Tarif Pelayanan	82,85	Baik
5	Produk/Jenis Pelayanan	80,83	Baik
6	Kompetensi/Pengetahuan Petugas Pelayanan	81,11	Baik
7	Maklumat Layanan	81,08	Baik
	Rata-rata Nilai IKM	80,43	Baik

Dari tabel 3.2. terlihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan DPMPTSP Kota Bandung adalah “Baik”. Kepuasan masyarakat tertinggi adalah dalam hal kewajaran biaya pelayanan dimana penghitungan dan penetapan biaya perizinan ditentukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai IKM paling rendah terletak pada aspek waktu pelayanan dengan nilai 78,38. Hal ini terjadi dikarenakan masih ada rekomendasi dari perangkat daerah teknis yang lambat dalam memproses validasinya, sehingga berimbas pada waktu pelayanan.

Dalam rangka mempertahankan IKM, DPMPTSP melakukan upaya penerapan punishment bagi pegawai yang tidak mengikuti apel pagi. Hal ini dilakukan agar pelayanan dapat diberikan secara optimal sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan. Realisasi penerbitan izin tahun 2010 – 2019 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Gambar 3.3
Menu Pelayanan Online pada aplikasi GAMPIL



Tabel 3.3
Realisasi Penerbitan Izin Tahun 2010 s.d Tahun 2019

NO	URAIAN JENIS IZIN	TAHUN PENERBITAN									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Izin Bongkar Muat								1164	1796	
2	Izin Gangguan (HO) / ITU	7585	8536	8682	9430	8048	6225	8380	5277	1417	
3	Izin Khusus Waktu Pelayanan (Bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern)	-	-	-	-	-	-	-	-	14	45
4	Izin Lingkungan	0	0	1	0	0	9	156	89	139	223
5	Izin Lingkungan untuk Pemerintah										5
6	Izin Lokasi	17	5	10	11	10	2	11	7	3	
7	Izin Usaha Industri (IUI)			96	104	87	71	105			8
8	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	4049	3693	4937	5924	4500	2974	3921	1613	3380	
9	Izin Mendirikan Bangunan untuk Rumah Tinggal 1 s/d 2 lantai										10
10	Izin Mendirikan Bangunan untuk NON Rumah Tinggal < 4 lantai										4
11	Izin Mendirikan Bangunan Lokal 1 s/d 2 lantai										2564

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG | Tahun 2020

NO	URAIAN JENIS IZIN	TAHUN PENERBITAN									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12	Izin Mendirikan Bangunan Lokal 3 lantai										89
13	Izin Mendirikan Bangunan Lokal Non Rumah Tinggal < = 4 Lantai Bangunan Pemerintah										9
14	Izin Mendirikan Bangunan Lokal Non Rumah Tinggal > 4 Lantai Bangunan Pemerintah										1
15	Izin Mendirikan Bangunan Splitzing Non Rumah Tinggal Lokal										393
16	Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal < = 4 Lantai										347
17	Izin Mendirikan Bangunan untuk NON Rumah Tinggal >= 10000 m2 dan SPBU										13
18	Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal Tanpa TKPRD										4
19	Salinan Izin Mendirikan Bangunan Terbit Sebelum Agustus 2015 (Non Online)										2
20	Izin Mendirikan Bangunan lokal Rumah Ibadat										9
21	Izin Menara Telekomunikasi										82
22	Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C										1
23	Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan D										1
24	Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C										3
25	Izin Operasional Bengkel Tertunjuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Izin Operasional Bengkel Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
27	Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan	9	6	5	12	14	1	1	28	59	46
28	Izin Pematangan Lahan/Tanah	13	16	15	38	32	16	19	14	9	2
29	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Skala Kota								-	-	
30	Izin pembuangan air limbah ke sungai	17	69	21	43	48	32	61	58	73	
31	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan										39

LAPORAN KINERJA DPMPSTP KOTA BANDUNG | Tahun 2020

NO	URAIAN JENIS IZIN	TAHUN PENERBITAN										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
32	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Skala Kota									-	-	
33	Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini								117	217		
34	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar								8	17		
35	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal								11	29		
36	Izin Usaha Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan											3
37	Izin Operasional / Komersial Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal											10
38	Izin Pengelolaan Tempat Parkir	68	83	62	98	45	15	74	41	30	103	
39	Izin Penyelenggaraan Angkutan Karyawan								-	-		
40	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek	5085	432	602	623	665	665	1178	438	328		
41	Izin Penyelenggaraan Angkutan Sekolah											
42	Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi								31	8		
43	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen	3380	5981	6262	5540	4776	3219	7393	2825	2033	59	
44	Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil											577
45	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen di Halaman (Persil) dan di Bangunan											2498
46	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen di Bahu jalan/Berm jalan/Trotoar, Jembatan, Jalan layang, Jalan Tol, Jembatan Kereta Api dan Shelter											37
47	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen di Jembatan Penyeberangan Orang dan Bando Jalan											10
48	Izin Penyelenggaraan Reklame Kendaraan											70
49	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)									-	-	

LAPORAN KINERJA DPMPSTP KOTA BANDUNG | Tahun 2020

NO	URAIAN JENIS IZIN	TAHUN PENERBITAN									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
50	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)								21	38	
51	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil										26
52	Izin Perluasan Kawasan Industri								-	-	
53	Izin Perluasan Usaha Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah								-	-	
54	Izin Praktik Dokter Hewan								3	8	8
55	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol								38	94	66
56	Izin Usaha Angkutan	8	22	57	45	30	17	48	20	21	
57	Izin Usaha Industri	207	291	239	234	233	132	161	94	80	
58	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	476	579	721	585	605	626	766	596	621	78
59	Izin Usaha Kawasan Industri Skala Kota								-	-	
60	Izin Usaha Pematangan Hewan								-	-	
61	Izin Apotek										10
62	Izin Toko Obat										1
63	Izin Operasional Klinik Pratama										4
64	Izin Operasional Klinik Utama										2
65	Izin Apoteker										66
66	Izin Tenaga Teknis Kefarmasian										83
67	Izin Radiografer										26
68	Izin Penata Anestesi										1
69	Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik										69
70	Izin Refraksionis Optisien										5
71	Izin Perekam Medis										82
72	Izin Program Pendidikan Dokter Spesialis										70
73	Izin Praktik Dokter Internsip										29
74	Izin Praktik Mandiri Dokter Umum										22
75	Izin Praktik Mandiri Dokter Spesialis										8
76	Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi										13
77	Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi Spesialis										5
78	Izin Praktik Mandiri Bidan										11

LAPORAN KINERJA DPMPSTP KOTA BANDUNG | Tahun 2020

NO	URAIAN JENIS IZIN	TAHUN PENERBITAN									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
79	Izin Perawat										432
80	Izin Fisioterapis										14
81	Izin Okupasi Terapis										1
82	Izin Tenaga Gizi										28
83	Izin Terapis Gigi dan Mulut										17
84	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)										11
85	Izin Optikal										1
86	Izin Dokter Umum										163
87	Izin Dokter Spesialis										174
88	Izin Dokter Gigi										34
89	Izin Dokter Gigi Spesialis										27
90	Izin Bidan										93
91	Izin Praktik Mandiri Perawat										2
92	Izin Sanitarian										14
93	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga										1
94	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional								-	-	
95	Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Skala Kota								-	-	
96	Izin Usaha Perdagangan	6228	7305	7962	8221	6770	5253	7275	3685	3315	147
97	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan								5	3	1
98	Izin Usaha Simpan Pinjam								3	4	
99	Izin Koperasi Simpan Pinjam										3
100	Izin Usaha Toko Modern								19	114	171
101	Kartu Pengawasan Angkutan Karyawan								-	5	
102	Kartu Pengawasan Angkutan Kota								513	643	
103	Kartu Pengawasan Angkutan Sekolah								-	20	
104	Kartu Pengawasan Angkutan Taksi								245	171	
105	Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Umum								573	749	
106	Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum								103	185	
107	Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek										100
108	Kartu Pengawasan Angkutan Orang Dalam Trayek										367
109	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing								139	95	

NO	URAIAN JENIS IZIN	TAHUN PENERBITAN									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
79	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba								1	-	
80	Tanda Daftar Gudang (TDG)	316	333	246	235	233	155	253	86	84	12
81	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	4513	6737	6830	6745	5621	4235	6319	3630	3591	
82	Tanda Daftar Usaha Kecil		88				88		50	50	
83	Tanda Daftar Usaha Mikro		633				633		73	53	7
84	Tanda Daftar Usaha Pariwisata								559	556	271
	Jumlah	36223	35665	37135	38323	32491	28668	37206	22177	20152	10044

Tabel 3.4
Realisasi Penerbitan Izin
Tahun 2020

NO	NAMA IZIN	OSS	BIDANG	JUMLAH IZIN TERBIT
1	Izin Mendirikan Bangunan Lokal Non Rumah Tinggal > 4 Lantai Bangunan Pemerintah	lokal	Bidang A	2
2	Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal Tanpa TKPRD	oss	Bidang A	5
3	Salinan Izin Mendirikan Bangunan Terbit Sebelum Agustus 2015 (Non Online)	lokal	Bidang A	6
4	Izin Mendirikan Bangunan Lokal Non Rumah Tinggal < = 4 Lantai Bangunan Pemerintah	lokal	Bidang A	8
5	Izin Lingkungan untuk Pemerintah	lokal	Bidang A	8
6	Izin Mendirikan Bangunan lokal Rumah Ibadat	lokal	Bidang A	9
7	Izin Mendirikan Bangunan untuk NON Rumah Tinggal >= 10.000 m2 dan SPBU	oss	Bidang A	9
8	Izin Mendirikan Bangunan Splitzing Non Rumah Tinggal Lokal	lokal	Bidang A	21
9	Izin Menara Telekomunikasi	lokal	Bidang A	37
10	Izin Mendirikan Bangunan Lokal 3 lantai	lokal	Bidang A	98
11	Izin Lingkungan	oss	Bidang A	143
12	Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal < = 4 Lantai	oss	Bidang A	473
13	Izin Mendirikan Bangunan Lokal 1 s/d 2 lantai_	lokal	Bidang A	2205
14	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	oss	Bidang B	0
15	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	oss	Bidang B	0

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG | Tahun 2020

NO	NAMA IZIN	OSS	BIDANG	JUMLAH IZIN TERBIT
16	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	oss	Bidang B	0
17	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	oss	Bidang B	0
18	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Lanjutan	oss	Bidang B	0
19	Izin Usaha Perdagangan (Usaha Toko Swalayan yang Terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Bangunan/Kawasan Lain)	oss	Bidang B	2
20	Izin Koperasi Simpan Pinjam	oss	Bidang B	4
21	Izin Usaha Perdagangan (Usaha Pusat Perbelanjaan)	oss	Bidang B	7
22	Tanda Daftar Gudang	oss	Bidang B	13
23	Izin Usaha Industri	oss	Bidang B	16
24	Izin Khusus Waktu Pelayanan (Bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern)	lokal	Bidang B	53
25	Izin Usaha Toko Modern	lokal	Bidang B	55
26	Izin Usaha Jasa Konstruksi	oss	Bidang B	108
27	Izin Usaha Perdagangan Umum	oss	Bidang B	144
28	Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C	oss	Bidang C	0
29	Izin Praktik Mandiri Ortosis Prostetis	lokal	Bidang C	0
30	Izin Tukang Gigi	lokal	Bidang C	0
31	Izin Toko Alat Kesehatan	oss	Bidang C	0
32	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	oss	Bidang C	0
33	Izin Operasional Klinik Dialisis	lokal	Bidang C	0
34	Izin Operasional Laboratorium Klinik Pratama_	oss	Bidang C	0
35	Izin Ortosis Prostetis	lokal	Bidang C	0
36	Izin Praktik Mandiri Okupasi Terapis	lokal	Bidang C	0
37	Izin Praktik Mandiri Tenaga Gizi	lokal	Bidang C	0
38	Izin Praktik Mandiri Terapis Wicara	lokal	Bidang C	0
39	Izin Optometris	lokal	Bidang C	0
40	Izin Praktik Mandiri Psikolog Klinis	lokal	Bidang C	0
41	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	lokal	Bidang C	0
42	Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang	lokal	Bidang C	0

NO	NAMA IZIN	OSS	BIDANG	JUMLAH IZIN TERBIT
43	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Jasa Usaha	oss	Bidang C	0
44	Izin Usaha Pemetongan Hewan	lokal	Bidang C	0
45	Izin Usaha Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	oss	Bidang C	0
46	Izin Pengelolaan Limbah untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	lokal	Bidang C	0
47	Izin Pengelolaan Limbah untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	lokal	Bidang C	0
48	Izin Operasional / Komersial Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan	lokal	Bidang C	0
49	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama	oss	Bidang C	0
50	Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama	oss	Bidang C	0
51	Izin Panti Sehat Berkelompok	lokal	Bidang C	0
52	Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler	lokal	Bidang C	0
53	Izin Pusat Kesehatan Masyarakat	lokal	Bidang C	0
54	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas C dan D	oss	Bidang C	1
55	Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan D	oss	Bidang C	1
56	Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C	oss	Bidang C	1
57	Izin Operasional Klinik Radiologi	lokal	Bidang C	1
58	Izin Praktik Mandiri Fisioterapis	lokal	Bidang C	1
59	Izin Praktik Mandiri Terapis Gigi dan Mulut	lokal	Bidang C	1
60	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit	oss	Bidang C	1
61	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	oss	Bidang C	2
62	Izin Praktik Dokter Hewan	lokal	Bidang C	3
63	Izin Salon Kecantikan	lokal	Bidang C	4
64	Izin Optikal	lokal	Bidang C	5
65	Izin Praktik Mandiri Perawat	lokal	Bidang C	5
66	Sertifikat Laik Sehat Hotel	lokal	Bidang C	5
67	Izin Okupasi Terapis	lokal	Bidang C	6

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG | Tahun 2020

NO	NAMA IZIN	OSS	BIDANG	JUMLAH IZIN TERBIT
68	Izin Psikolog Klinis	lokal	Bidang C	6
69	Izin Elektromedis	lokal	Bidang C	8
70	Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan / Restoran	lokal	Bidang C	9
71	Izin Terapis Wicara	lokal	Bidang C	11
72	Izin Operasional Klinik Utama	oss	Bidang C	12
73	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	lokal	Bidang C	14
74	Izin Operasional Klinik Pratama	oss	Bidang C	17
75	Izin Usaha Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan	oss	Bidang C	17
76	Izin Refraksionis Optisien	lokal	Bidang C	18
77	Izin Toko Obat	oss	Bidang C	18
78	Izin Penata Anestesi	lokal	Bidang C	19
79	Izin Sanitarian	lokal	Bidang C	20
80	Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi Spesialis	lokal	Bidang C	24
81	Izin Praktik Mandiri Dokter Spesialis	lokal	Bidang C	29
82	Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi	lokal	Bidang C	35
83	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan	oss	Bidang C	36
84	Izin Fisioterapis	lokal	Bidang C	41
85	Izin Tenaga Gizi	lokal	Bidang C	51
86	Izin Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis	lokal	Bidang C	52
87	Izin Terapis Gigi dan Mulut	lokal	Bidang C	55
88	Izin Radiografer	lokal	Bidang C	56
89	Izin Operasional / Komersial Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	oss	Bidang C	57
90	Izin Praktik Mandiri Dokter Umum	lokal	Bidang C	65
91	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	oss	Bidang C	73
92	Izin Praktik Mandiri Bidan	lokal	Bidang C	75
93	Izin Dokter Gigi Spesialis	lokal	Bidang C	76
94	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	lokal	Bidang C	82
95	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	lokal	Bidang C	93

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG | Tahun 2020

NO	NAMA IZIN	OSS	BIDANG	JUMLAH IZIN TERBIT
96	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	oss	Bidang C	105
97	Izin Apotek	oss	Bidang C	112
98	Izin Dokter Gigi	lokal	Bidang C	128
99	Izin Perekam Medis	lokal	Bidang C	132
100	Izin Praktik Dokter Internsip	lokal	Bidang C	148
101	Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan_	lokal	Bidang C	165
102	Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik	lokal	Bidang C	175
103	Izin Program Pendidikan Dokter Spesialis	lokal	Bidang C	192
104	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	oss	Bidang C	231
105	Izin Apoteker	lokal	Bidang C	309
106	Izin Bidan	lokal	Bidang C	332
107	Izin Tenaga Teknis Kefarmasian	lokal	Bidang C	447
108	Izin Dokter Umum	lokal	Bidang C	456
109	Izin Dokter Spesialis	lokal	Bidang C	573
110	Izin Perawat	lokal	Bidang C	2571
111	Izin Usaha Angkutan	oss	Bidang D	0
112	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek_	lokal	Bidang D	0
113	Izin Operasional Bengkel Tertunjuk	lokal	Bidang D	0
114	Izin Operasional Bengkel Umum	lokal	Bidang D	0
115	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen di Taman	lokal	Bidang D	0
116	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen	lokal	Bidang D	1
117	Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	lokal	Bidang D	20
118	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen di Jembatan Penyeberangan Orang dan Bando Jalan	lokal	Bidang D	24
119	Izin Penyelenggaraan Reklame Kendaraan	lokal	Bidang D	33
120	Izin Pengelolaan Tempat Parkir	lokal	Bidang D	37

NO	NAMA IZIN	OSS	BIDANG	JUMLAH IZIN TERBIT
121	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen di Bahu jalan/Berm jalan/Trotoar, Jembatan, Jalan layang, Jalan Tol, Jembatan Kereta Api dan Shelter	lokal	Bidang D	106
122	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	lokal	Bidang D	126
123	Kartu Pengawasan Angkutan Orang Dalam Trayek	lokal	Bidang D	260
124	Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil	lokal	Bidang D	359
125	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen di Halaman (Persil) dan di Bangunan	lokal	Bidang D	2353
JUMLAH TOTAL				13928

Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa pada Tahun 2020 jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 13.928 izin. Dengan jumlah hari kerja pada tahun 2020 sebanyak 244 hari, maka rata-rata jumlah penerbitan izin per hari kerja sebanyak 57 izin.

Pada periode tahun 2010 – 2020, jenis izin terbanyak yang dimohon oleh masyarakat Kota Bandung adalah “Izin Penyelenggaraan Reklame”, diikuti oleh “Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”.

Gambaran secara keseluruhan, perkembangan jumlah total izin yang diterbitkan DPMPTSP Kota Bandung periode 2010 – 2020 diperlihatkan pada grafik 3.2 sebagai berikut:

Dari Grafik 3 terlihat bahwa pada periode 2010 – 2020, jumlah tertinggi penerbitan izin DPMPTSP Kota Bandung adalah tahun 2013 sebanyak 38.323 izin. Pada tahun 2020 realisasi penerbitan izin terlihat lebih tinggi dari tahun 2019.

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

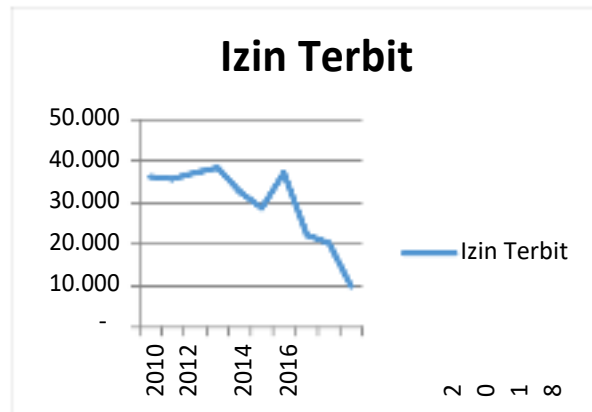
Realisasi indikator kinerja IKM tahun 2020 sebesar 80,43 ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 80,30. Realisasi kinerja Tahun 2020 yang lebih tinggi dibandingkan Tahun 2019 dipengaruhi oleh:

1. Komitmen seluruh ASN DPMPTSP untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan yang akuntabel dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas;

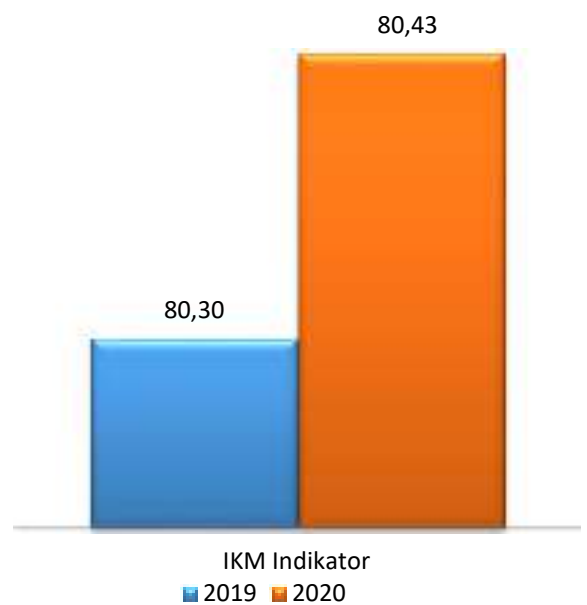
2. Pelaksanaan sosialisasi

pelayanan perizinan online melalui berbagai media juga melaksanakan sosialisasi ke kantor-kantor Kecamatan dan di ruang terbuka publik seperti Sosialisasi OSS di Car Free Day Dago, Sosialisasi Oss untuk Pelaku Usaha di Kantor Kecamatan, di Tahun 2020 pelayanan perbantuan secara langsung dialihkan ke Pelayanan secara virtual, disebabkan dengan adanya Pandemi Covid 19 yang masih berlangsung hingga sampai dengan saat ini.

3. Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.



Grafik 3
Perkembangan Jumlah izin Terbit Tahun 2010 -2018



b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sejalan dengan realisasi kinerja, capaian indikator kinerja IKM tahun 2020 sebesar 100,30% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100,16%. Adapun perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya diuraikan pada tabel 3.3. berikut ini :



LAPORAN KINERJA DPMPSTP KOTA BANDUNG | Tahun 2020

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2010 – 2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN PENERBITAN											REALISASI PROPINSI	KETERANGAN
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	N/A	N/A	88,71	95,04	83,28	79,27	82,89	79,38	80,15	80,3	80,43	79,56	Target RPJPD/RPJMD
2	Tingkat Kinerja Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Persen	90,89	107,96	136,7	137,7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Target RPJPD/RPJMD
3	Jumlah Investor Baru Per Tahun	Perusahaan	N/A	N/A	N/A	5527	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Target RPJPD/RPJMD
4	Penataan Penyelenggaraan reklame melalui perijinan	Persen	N/A	N/A	N/A	92,33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Pelayanan Perijinan Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi (IT)	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A
6	Persentase layanan ijin sesuai waktu	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	66,48	69,59	76,95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Indikator Baru Hasil Verifikasi Menpan
7	Persentase Penurunan Pengaduan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21,86	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	Indikator Baru Hasil Verifikasi Menpan
8	Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	930	990	990	1000	1000	1000	N/A	940	Indikator Baru Hasil Verifikasi Menpan
9	Rata-Rata Hari Penyelesaian Pelayanan Perizinan	Hari Kerja	N/A	N/A	N/A	N/A	8,39	6,2	8,73	10,77	6,9	5,13	N/A	N/A	Indikator Baru Hasil Verifikasi Menpan
10	Target RPJMD Nilai Evaluasi AKIP Walkot/Wawalkot	Nilai	N/A	N/A	N/A	70,38	74,22	72,5	74,22	74,58	74,77	N/A	N/A	N/A	Target RPJMD Janji Walkot/ Wawalkot
11	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	N/A	Target RPJMD Janji Walkot/ Wawalkot
12	Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	N/A	Target RPJMD Janji Walkot/ Wawalkot
13	Persentase Penurunan Temuan BPK/Inspektorat	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Indikator Baru Hasil Verifikasi Menpan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra DPMPTSP periode 2018-2023, maka realisasi indikator kinerja IKM tahun 2020 sebesar 80,43 telah mencapai 100,30% dari target akhir periode Renstra sebesar 80,25. Dengan capaian yang sangat baik pada Tahun 2020 ini, ke depannya pelayanan perijinan DPMPTSP Kota Bandung perlu dipertahankan dan harus terus ditingkatkan.



Gambar 3.3
Aplikasi GAMPIL pada Android

Mewujudkan Bandung sebagai Kota yang berbasis Smart City merupakan upaya kreatif dalam meningkatkan daya saing warga kota, baik level regional, nasional, bahkan internasional.

Perizinan pintar yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah layanan perizinan yang memanfaatkan teknologi dan informasi, guna mengurai birokrasi menjadi inovasi layanan yang berorientasi pada kemudahan

layanan, kepastian waktu, dan kepastian biaya.

GAMPIL (*Gadget Mobile Application for License*) merupakan aplikasi perizinan berbasis *smartphone* yang bertujuan untuk memanjakan pelanggan dengan kemudahan, cukup dengan ujung jari, dokumen perizinan ditangan anda. GAMPIL yang merupakan menu komplemen menu dari aplikasi Hay.U bandung adalah jawaban terhadap permasalahan perizinan melalui 10 kebijakan layanan, yang pada akhirnya menjadi solusi atas kebutuhan warga, khususnya dalam mengurus perizinan yang selalu dinilai rumit dan berbelit. Perizinan pintar merupakan bentuk

implementasi dalam mewujudkan Bandung Smart City. GAMPIL dalam Aplikasi Hay.U bandung menjawab permasalahan melalui 10 kebijakan layanan, yaitu:

1. Lebih sederhana
2. Lebih mudah



Gambar 3.4
Pengumuman pada Pop up Website

3. Lebih cepat
 4. Lebih transparan
 5. *Zero complain*
 6. Memberikan kualitas layanan
 7. Mudah. Itu kata pengguna
 8. *Zero credit*
 9. Active notification
 10. Layanan terintegrasi
- 10 Kebijakan layanan tersebut konsep Satu Sentuhan untuk

diwujudkan melalui perizinan pintar dengan Kemudahan.

Untuk mendapatkan layanan perizinan, cukup dengan 3 langkah mudah:

1. Klik dpmptsp.bandung.go.id atau download aplikasi GAMPIL pada smartphone (daftar dan lengkapi persyaratan)
2. **Lakukan pembayaran** melalui teller atau ATM (untuk izin yang berbayar)
3. **Tunggu dirumah.** Dokumen perizinan akan diantar melalui pos ke rumah

Perizinan pintar merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan Bandung Kota pintar, kini kemudahan sudah ada di tangan warga Kota Bandung.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Instansi Lainnya yang Sejenis

Dibandingkan dengan IKM atas pelayanan perijinan pada DPMPTSP Kota Metro yang diperoleh melalui website resmi Kota Metro (<http://pmptsp.metrokota.go.id/>) kepuasan masyarakat atas layanan perijinan DPMPTSP Kota Bandung lebih rendah, dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan IKM Tahun 2020 DPMPTSP Kota Bandung
dengan DPMPTSP Kabupaten Bogor serta Disyanjak Kota Bandung

DPMPTSP Kota Bandung	DPMPTSP Kota Bogor	BPPD Kota Bandung
80,43	87,13	91,74

Indikator Kinerja 1.2 Rata-rata waktu layanan izin

Rata-rata waktu layanan izin dihitung dengan cara membandingkan jumlah izin yang sesuai waktu dengan jumlah jenis izin keseluruhan. Adapun data rata-rata waktu layanan izin dihitung oleh sistem secara online dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja.



Acuan waktu yang digunakan berdasar pada Peraturan Walikota Bandung No. 235 Tahun 2017 Tentang SOP DPMPTSP. Berdasarkan pasal 41 ayat 2 bahwa:

Jangka waktu pelayanan perizinan dan non perizinan mulai dari pendaftaran secara elektronik sampai dengan penandatanganan untuk dokumen izin dan non izin baru ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dan untuk izin dan non izin diluar permohonan baru ditetapkan paling lambat 4 (empat) hari kerja.

Waktu layanan untuk *herregistrasi* dalam Peraturan Walikota Bandung No. 235 Tahun 2017 ditentukan selama 4 hari kerja untuk semua jenis izin yang memerlukan *herregistrasi*.

Berikut data rata-rata waktu layanan izin yang direkap (dihitung langsung oleh sistem) setiap akhir bulan sepanjang tahun 2020:

Tabel 3.6
Rata-rata waktu layanan izin Tahun 2020

TAHUN	JUMLAH IZIN TERBIT	RATA-RATA
2020	13928	3 hari, 20 jam, 18 menit, 41 detik.

Gambar tabel rincian ganti dengan 3 hari, 20 jam, 18 menit, 41 detik.

<< Kembali

Waktu Proses Perizinan

Laporan Detail Waktu Proses - Periode: 01/01/2020 Sampai Dengan 12/31/2020

No	Nama Izin	Jml Izin	Waktu
1	Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik	256	2 hari, 18 jam, 32 menit, 55 detik.
2	Izin Apoteker	397	2 hari, 12 jam, 7 menit, 0 detik.
3	Izin Apotek	180	2 hari, 19 jam, 32 menit, 48 detik.
4	Izin Bidan	467	2 hari, 6 jam, 27 menit, 39 detik.
5	Izin Dokter Gigi Spesialis	91	2 hari, 17 jam, 49 menit, 14 detik.
6	Izin Dokter Gigi	159	2 hari, 19 jam, 29 menit, 9 detik.
7	Izin Dokter Spesialis	665	2 hari, 14 jam, 5 menit, 52 detik.
8	Izin Dokter Umum	590	2 hari, 4 jam, 40 menit, 58 detik.
9	Izin Elektromedis	9	2 hari, 11 jam, 33 menit, 7 detik.
10	Izin Fisioterapis	35	2 hari, 0 jam, 50 menit, 26 detik.
11	Izin Khusus Waktu Pelayanan (Bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern)	54	5 hari, 8 jam, 32 menit, 56 detik.
12	Izin Koperasi Simpan Pinjam	5	4 hari, 5 jam, 55 menit, 14 detik.
13	Izin Lengkapi untuk Perumahan	10	4 hari, 8 jam, 41 menit, 28 detik.
14	Izin Lengkapi	243	2 hari, 12 jam, 20 menit, 3 detik.
15	Izin Murni Tidak bertingkat	40	2 hari, 12 jam, 44 menit, 15 detik.
16	Izin Mendirikan Bangunan Lokal 1 s.d 2 Lantai	2705	2 hari, 20 jam, 34 menit, 20 detik.
17	Izin Mendirikan Bangunan Lokal 3 Lantai	134	2 hari, 2 jam, 25 menit, 47 detik.
18	Izin Mendirikan Bangunan Lokal Non Rumah Tinggal < 4 Lantai Bangunan Perumahan	27	0 hari, 22 jam, 1 menit, 47 detik.
19	Izin Mendirikan Bangunan Lokal Non Rumah Tinggal < 4 Lantai Bangunan Perumahan	5	0 hari, 14 jam, 50 menit, 41 detik.
20	Izin Mendirikan Bangunan Lokal Rumah Lantai	23	0 hari, 20 jam, 11 menit, 26 detik.
21	Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal < 4 Lantai	710	2 hari, 7 jam, 1 menit, 4 detik.
22	Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal Tanpa TKTRD	10	1 hari, 0 jam, 3 menit, 11 detik.
23	Izin Mendirikan Bangunan Saling Non Rumah Tinggal Lokal	42	4 hari, 8 jam, 23 menit, 20 detik.
24	Izin Mendirikan Bangunan untuk NON Rumah Tinggal > 10.000 m2 dan SPBU	10	0 hari, 14 jam, 43 menit, 25 detik.
25	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C	0	
26	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas D - Persewa	11	
27	Izin Okupasi Tempata	13	8 hari, 22 jam, 2 menit, 0 detik.
28	Izin Operasional / Komersial / Pendidikan Program atau Satuan Pendidikan	0	
29	Izin Operasional / Komersial / Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Non Formal	61	2 hari, 17 jam, 52 menit, 19 detik.
30	Izin Operasional Hengkel Lemparus	11	
31	Izin Operasional Berekal Umum	0	
32	Izin Operasional Klinik Ibtide	11	
33	Izin Operasional Klinik Praktek	21	1 hari, 1 jam, 6 menit, 21 detik.
34	Izin Operasional Klinik Bedologi	2	2 hari, 22 jam, 14 menit, 50 detik.
35	Izin Operasional Klinik Urine	11	1 hari, 10 jam, 05 menit, 27 detik.
36	Izin Operasional Laboratorium Klinik Praktek	0	
37	Izin Operasional Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) untuk Perumahan	42	2 hari, 18 jam, 38 menit, 25 detik.
38	Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C	1	2 hari, 7 jam, 01 menit, 16 detik.

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG | Tahun 2020

39	Unit Operasional Ramah Sani, Umam Kuku C dan D.	1	1 hari, 25 jam, 30 menit, 30 detik.
40	Unit Operasional Ramah Sani, Umam Kuku D Prutama.	0	
41	Unit Optik.	6	1 hari, 0 jam, 15 menit, 50 detik.
42	Unit Optometri.	1	0 hari, 0 jam, 50 menit, 1 detik.
43	Unit Operasi Prostetik.	0	
44	Unit Panti Sosial Bukitumpuk.	0	
45	Unit Pemantauan Kualitas Minyak Jelant dan Minyak MIEK Jelant dan Minyak Pengawakan Jelant.	224	0 hari, 1 jam, 6 menit, 0 detik.
46	Unit Pemantauan Air Limbah ke Air Perumahan.	41	3 hari, 0 jam, 31 menit, 30 detik.
47	Unit Pemantauan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam.	0	
48	Unit Pemantauan Kantor Cabang Koperasi Koperasi Simpan Pinjam.	0	
49	Unit Pemantauan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam.	1	0 hari, 0 jam, 28 menit, 41 detik.
50	Unit Panti Anakes.	22	2 hari, 8 jam, 44 menit, 18 detik.
51	Unit Pemadatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Jawa Tengah.	0	
52	Unit Pengalihan Lempas Kardin.	54	6 hari, 15 jam, 31 menit, 5 detik.
53	Unit Penyelenggaraan Angkutan Daring Dalam Negeri.	100	5 hari, 10 jam, 11 menit, 15 detik.
54	Unit Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan Ilustasi Kemasyarakatan.	1	1 hari, 7 jam, 11 menit, 14 detik.
55	Unit Penyelenggaraan Prasarana Persepsi Publik Umum.	0	
56	Unit Penyelenggaraan Ruknina Perantara.	300	5 hari, 1 jam, 32 menit, 10 detik.
57	Unit Penyelenggaraan Ruknina Kendaran.	40	5 hari, 2 jam, 42 menit, 45 detik.
58	Unit Penyelenggaraan Ruknina Perumahan di Bahu Jalan/Bermijak/Trottoir, Jambatan, Jalan Lintas, Jalan Tol, Jembatan Kereta Api dan Stasiun.	140	7 hari, 21 jam, 2 menit, 35 detik.
59	Unit Penyelenggaraan Ruknina Perumahan di Halaman (Pasar) dan di Bangunan.	2018	6 hari, 8 jam, 48 menit, 40 detik.
60	Unit Penyelenggaraan Ruknina Perumahan di Jambatan Penyelenggaraan Chang dan Bando Jalan.	26	10 hari, 10 jam, 20 menit, 32 detik.
61	Unit Penyelenggaraan Reklame Perumahan di Lahan.	0	
62	Unit Penyelenggaraan Sarana Parkir Luas dan Umum.	0	
63	Unit Rawan.	1055	0 hari, 0 jam, 0 menit, 5 detik.
64	Unit Rawan Medis.	1,70	1 hari, 0 jam, 10 menit, 15 detik.
65	Unit Rawan Dokter Umum.	1	0 hari, 7 jam, 54 menit, 0 detik.
66	Unit Rawan Dokter Internisip.	1,20	0 hari, 17 jam, 17 menit, 15 detik.
67	Unit Rawan Mandiri Umum.	103	1 hari, 21 jam, 11 menit, 15 detik.
68	Unit Rawan Mandiri Umum Cipta Peduli.	27	0 hari, 11 jam, 10 menit, 10 detik.
69	Unit Rawan Mandiri Umum Cipta.	06	0 hari, 11 jam, 41 menit, 50 detik.
70	Unit Rawan Mandiri Umum Cipta Peduli.	15	0 hari, 21 jam, 10 menit, 10 detik.
71	Unit Rawan Mandiri Umum Umum.	40	1 hari, 0 jam, 19 menit, 11 detik.
72	Unit Rawan Mandiri Umum Cipta.	2	0 hari, 14 jam, 52 menit, 10 detik.
73	Unit Rawan Mandiri Cipta Peduli Cipta.	0	
74	Unit Pratik Mandiri Cipta Prastasi.	0	
75	Unit Rawan Mandiri Rawan.	14	1 hari, 19 jam, 41 menit, 12 detik.
76	Unit Rawan Mandiri Rekrutng Klinik.	2	4 hari, 7 jam, 5 menit, 11 detik.
77	Unit Rawan Mandiri Tenaga IAH.	0	
78	Unit Pratik Mandiri Tenaga Gerdan Motor.	3	1 hari, 0 jam, 44 menit, 31 detik.
79	Unit Pratik Mandiri Tenaga Wisata.	0	
80	Unit Rawan Mandiri Kesehatan.	0	
81	Unit Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis.	57	2 hari, 10 jam, 40 menit, 30 detik.
82	Unit Program Pendidikan Dokter Spesialis.	280	2 hari, 2 jam, 4 menit, 5 detik.
83	Unit Paksiak Klinik.	9	3 hari, 2 jam, 55 menit, 3 detik.
84	Unit Pusa Kesehatan Masyarakat.	0	
85	Unit Radiografi.	24	0 hari, 11 jam, 57 menit, 0 detik.

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG | Tahun 2020

86	Izin Restorasi Kapal	20	2 hari, 6 jam, 19 menit, 17 detik
87	Izin Sulat Kapal	6	5 hari, 21 jam, 47 menit, 30 detik
88	Izin Samudra	20	2 hari, 17 jam, 40 menit, 30 detik
89	Izin Tukang Gas	0	
90	izin Lempar Perjudian Minuman Beralkohol Lapangan Hitam C.	151	2 hari, 17 jam, 16 menit, 11 detik
91	izin Lempar I.H.	61	1 hari, 4 jam, 50 menit, 40 detik
92	izin Lempar Sektor Ketenteraan	610	1 hari, 7 jam, 11 menit, 11 detik
93	izin Lempar Taj dan Nilot	77	2 hari, 7 jam, 16 menit, 19 detik
94	izin Lempar Monev	17	2 hari, 12 jam, 20 menit, 11 detik
95	izin Liris Alas Kesehatan	11	
96	Izin Toko Obat	27	3 hari, 0 jam, 40 menit, 15 detik
97	Izin Tukang Gas	0	
98	izin Usaha Industri	26	2 hari, 10 jam, 11 menit, 15 detik
99	izin Usaha Jasa Konstruksi	157	1 hari, 2 jam, 9 menit, 11 detik
100	izin Usaha Jasa Lebak (dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal)	11	
101	Izin Usaha Pemukiman Rawan	0	
102	izin Usaha Pendidikan Program Akademi Pendidikan	201	1 hari, 16 jam, 45 menit, 15 detik
103	izin Usaha Pengolahan Pasar Tradisional	11	
104	Izin Usaha Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	0	
105	izin Usaha Perdagangan (Usaha Pasar Belanjaan)	11	1 hari, 21 jam, 10 menit, 11 detik
106	Izin Usaha Perdagangan (Usaha Toko Swalayan yang Berdiri Sendiri)	0	
107	Izin Usaha Perdagangan (Usaha Toko Swalayan yang Terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Bangunan/Kawasan Lain)	4	2 hari, 13 jam, 12 menit, 17 detik
108	Izin Usaha Perdagangan Umum	182	3 hari, 11 jam, 56 menit, 54 detik
109	Izin Usaha Toko Modern	76	5 hari, 11 jam, 36 menit, 22 detik
110	Kartu Pengawasan Angkutan Orang Dalam Trayek	283	4 hari, 3 jam, 21 menit, 49 detik
111	Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	62	2 hari, 15 jam, 7 menit, 53 detik
112	Salinan Izin Mendirikan Bangunan Terbit Sebelum Agustus 2015 (Non Online)	15	6 hari, 11 jam, 53 menit, 2 detik
113	Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan / Restoran	13	2 hari, 9 jam, 4 menit, 14 detik
114	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	0	
115	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	21	2 hari, 10 jam, 3 menit, 22 detik
116	Sertifikat Laik Sehat Hotel	7	3 hari, 9 jam, 25 menit, 34 detik
117	Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang	0	
118	Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga	130	4 hari, 0 jam, 29 menit, 31 detik
119	Sertifikat Produk Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	3	6 hari, 12 jam, 52 menit, 19 detik
120	Sertifikat Produk Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	0	
121	Surat Tanda Pendaftaran Weralaba	0	
122	Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional (STPT)	93	2 hari, 18 jam, 43 menit, 0 detik
123	Tanda Daftar Gudang	14	3 hari, 10 jam, 22 menit, 8 detik
124	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	362	2 hari, 23 jam, 46 menit, 4 detik
Total		17429	3 hari, 20 jam, 18 menit, 41 detik

Pada tahun 2020, realisasi rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan selama 3 hari 20 jam 18 menit 41 detik, mencapai 157,14% (([2x7]- 3 hari 20 jam 18 menit 41 detik)/7 x 100%), dari target tahun 2020 selama 7 hari kerja.

Diharapkan ke depan pelayanan perizinan online menjadi lebih cepat dan lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Perbandingan Kinerja**a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Pada tahun 2020 capaian kinerja mencapai selama 3 hari 20 jam 18 menit 41 detik sedangkan pada tahun 2019 capaian kinerja mencapai 5 hari 3 jam 37 menit 13 detik. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2019. Pencapaian tersebut perlu dievaluasi kembali agar waktu pelayanan tidak menurun walaupun masih memenuhi target SOP selama 7 hari kerja.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra DPMPTSP periode 2018-2023, maka realisasi indikator kinerja rata-rata hari penyelesaian perizinan tahun selama 3 hari 20 jam 18 menit 41 detik, mencapai 157,14% ($\frac{3 \text{ hari } 20 \text{ jam } 18 \text{ menit } 41 \text{ detik}}{7 \text{ hari}} \times 100\%$), dari target tahun 2020 selama 7 hari kerja. Dengan capaian pada tahun 2020 ini, ke depannya kecepatan dalam layanan perijinan DPMPTSP Kota Bandung perlu terus ditingkatkan agar dapat memenuhi harapan masyarakat dimana penyelenggaraan pelayanan publik cepat dan efisien.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Instansi Lainnya yang Sejenis

Belum ada instansi lain yang sejenis yang menargetkan rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan maka data realisasi kinerja belum bisa dibandingkan dengan instansi lain.

**Indikator Kinerja I.3
Rata-rata Waktu Respon pengaduan**

Indikator Rata-rata Waktu Respon Pengaduan dihitung dengan cara membandingkan jumlah jam penyelesaian pengaduan dengan jumlah pengaduan.

$$\frac{\text{Jumlah jam penyelesaian pengaduan}}{\text{Jumlah pengaduan}} = h$$

Pengaduan yang dimaksud dalam indikator ini adalah pengaduan berupa komplain yang merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan DPMPTSP Kota Bandung. Data rata-rata waktu respon pengaduan dihitung otomatis oleh sistem.

Berikut data rata-rata waktu waktu respon pengaduan yang direkap (dihitung langsung oleh sistem) setiap akhir bulan sepanjang tahun 2020 :

Tabel 3.7
Rata-rata Waktu Respon Pengaduan (per bulan)

NO	BULAN	JUMLAH PENGADUAN	RATA-RATA (JAM)
1	JANUARI	59	1.97
2	PEBRUARI	57	2.21
3	MARET	47	2.3
4	APRIL	40	2.22
5	MEI	20	1.98
6	JUNI	29	2
7	JULI	61	0.9
8	AGUSTUS	67	0.95
9	SEPTEMBER	85	0.83
10	OKTOBER	69	1.55
11	NOPEMBER	67	1.3
12	DESEMBER	69	1.73

Eviden sumber data

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2020 rata-rata waktu respon pengaduan mencapai 1,55 jam (rata-rata per bulan sepanjang tahun 2020) sedangkan tahun 2019 mencapai 2,43 jam, maka realisasi kinerja 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2019 hal ini terjadi karena optimalisasi pelayanan pengaduan dimana ASN yang mengelola pegaduan merespon setiap pengaduan dengan cepat dan sigap.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sama halnya dengan realisasi kinerja, capaian indikator kinerja rata-rata waktu respon pengaduan tahun 2020 sebesar 148,33% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dengan capaian sebesar 119,00%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Realisasi Indikator Kinerja “Rata-rata waktu respon pengaduan” 1,55 jam telah mencapai 148,33% dari target akhir periode Renstra sebesar 3 jam.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Instansi Lainnya yang Sejenis

Realisasi kinerja belum bisa dibandingkan dengan instansi lain yang sejenis karena pada Instansi lain belum ada yang menjadikan indikator rata-rata waktu respon pengaduan sebagai indikator kinerja.



Analisis Efisiensi

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan Terpadu”, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 3.371.346.700,00, atau 68,96% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp 4.888.803.689,00. Realisasi kinerja sasaran strategis rata-rata telah mencapai 157,14%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 68,96% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien.

Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indkator kinerja yang mencapai atau melampaui target. Dari 3 indikator kinerja pada sasaran pertama, terdapat 3 indikator kinerja yang mencapai target.

Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (≥100%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,30%	68,96%	8,09%
		Rata-rata Waktu Layanan Izin	157,14%	68,96%	36,50%
		Rata-rata Waktu Respon Penyelesaian Pengaduan	148,33%	68,96%	26,93%

SASTRA II

Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi

Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2 (dua) sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja. Indikator Kinerja tersebut sudah mencapai target.

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) “Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi” diukur dengan menggunakan satu Indikator Kinerja yaitu Nilai Investasi Berskala Nasional.

Uraian target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
Nilai Investasi Berskala Nasional PMA/PMDN	Rp. 8.436.106.735.799	Rp. 18.263.474.155.264	5,65 Triliun	323,25%	7,12 Triliun

Ket: **✓** = mencapai target, **✗** = tidak mencapai target, N/A = not available

Dekripsi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Penanaman modal (*investment*) adalah penanaman uang atau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif. Adapun faktor-faktor yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya antara lain: Faktor Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Faktor Stabilitas Politik dan Perekonomian, Faktor Kebijakan Pemerintah, dan Faktor Kemudahan dalam Perizinan. Penanaman modal dibagi dua yaitu, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 bahwa penanaman modal adalah Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan undang undang nomor 23 tahun 2014 penanaman modal merupakan urusan wajib yang bersifat non pelayanan dasar. Sebagai turunan dari UU tersebut lahir PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengamankan Penanaman Modal sebagai urusan wajib yang bentuknya harus berbentuk Dinas.

Isu isu strategis Penanaman Modal

1. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing Kota Bandung
2. Tersedianya rumusan kebijakan penanaman modal yang mendukung iklim investasi Kota Bandung sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan penanaman modal yang diarahkan pada peningkatan daya saing kota.
3. Meningkatkan citra Kota Bandung sebagai Kota tujuan penanaman modal yang prospektif dan kondusif dan menjanjikan bagi para investor baik dalam maupun luar negeri.
4. Meningkatkan kerjasama penanaman modal pemerintah dengan badan usaha (PPP) sebagai percepatan investasi di Kota Bandung.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan pelayanan yang berdampak pada kondusifnya iklim investasi di Kota Bandung
6. Meningkatkan realisasi dan diversifikasi penanaman modal melalui proyek – proyek investasi untuk meningkatkan percepatan ekonomi kota.

Kinerja Tahun 2020

**Indikator Kinerja 2.1
Nilai Investasi Berskala Nasional**

Realisasi nilai investasi merupakan salah satu indikator kemajuan ekonomi suatu wilayah. DPMPTSP Kota Bandung sebagai OPD yang bertanggung jawab atas penyelesaian urusan penanaman modal harus mewujudkan nilai investasi sesuai target yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Bandung. Nilai investasi dihitung berdasarkan data dari LKPM yang diterbitkan Provinsi Jawa Barat dijumlahkan dengan realisasi investasi dari SIUP baru yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Bandung.

Berikut data realisasi nilai investasi berskala nasional yang direkap setiap akhir bulan sepanjang tahun 2020 :

Tabel 3.8
Nilai Investasi Berskala Nasional dari SIUP Baru

NO	BULAN	JUMLAH INVESTOR	TKI	NILAI INVESTASI
1	BULAN JANUARI	4	26	4.600.000.000
2	BULAN FEBRUARI	4	27	251.325.000.000
3	BULAN MARET	17	119	2.868.688.000.000
4	BULAN APRIL	12	90	46.100.000.000
5	BULAN MEI	7	673	1.220.486.419.960
6	BULAN JUNI	7	68	2.899.035.000
7	BULAN JULI	19	88	11.520.000.000
8	BULAN AGUSTUS	22	687	1.796.803.300.000
9	BULAN SEPTEMBER	11	92	221.556.587.641
10	BULAN OKTOBER	9	37	2.085.000.000
11	BULAN NOVEMBER	28	814	1.165.356.185.695
12	BULAN DESEMBER	12	123	46.452.000.000
	TOTAL INVESTASI	152	2.844	7.637.871.528.296

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG | Tahun 2020

Tabel 3.9
Nilai Investasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

NO	PERIODE LAPORAN	JENIS INVESTASI	JUMLAH INVESTOR	JUMLAH LKPM	TKI	TKA
1	Triwulan 1 (Bulan Januari-Maret)					
	PMA	403.218.854.599	26	51	97	0
	PMDN	135.574.200.000	35	71	203	0
2	Triwulan 2 (Bulan April - Juni)					
	PMA	782.631.764.407	47	113	720	1
	PMDN	714.341.400.000	85	182	644	
3	Triwulan 3 (Bulan Juli - September)					
	PMA	190.774.119.144	55	117	243	12
	PMDN	872.111.300.000	125	304	662	2
4	Triwulan 4 (Bulan Oktober- Desember)					
	PMA	625.334.488.818	52	159	230	
	PMDN	6.901.616.500.000	144	471	831	
	TOTAL INVESTASI	10.625.602.626.968	569	1468	3630	15

TOTAL JUMLAH INVESTASI LKPM DAN SIUP BARU TAHUN 2020 : 18.263.474.155.264

TOTAL JUMLAH INVESTOR : 721

TOTAL JUMLAH TKI : 6474

TOTAL JUMLAH TKA : 17

TOTAL JUMLAH LKPM : 1468

Pada tahun 2020, realisasi nilai investasi berskala nasional mencapai **Rp 18.263.474.155.264**, mencapai 323,25% ($5.65 \text{ triliun} \times 100\%$), dari target tahun 2020 sebesar Rp 5.65 triliun.

Diharapkan ke depan nilai investasi yang masuk ke Kota Bandung dapat terus meningkat. Peningkatan nilai investasi juga diharapkan sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat Kota Bandung.

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya (2019), capaian tahun 2019 sebesar Rp. **8.436.106.735.799** sedangkan pada tahun 2020 capaian nilai realisasi investasi mencapai Rp. **18.263.474.155.264**. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2019. Peningkatan realisasi investasi tersebut terjadi karena Regulasi sudah berjalan secara beriringan antara PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS) dengan Regulasi Kab/Kota sehingga masyarakat pelaku usaha lebih dimudahkan dalam melakukan proses perizinan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra DPMPTSP periode 2018-2023, maka realisasi capaian kinerja nilai realisasi investasi sebesar Rp. **18.263.474.155.264**, mencapai 323,25% ($7.12 \text{ triliun} \times 100\%$) dari target akhir periode Renstra (2023) sebesar Rp 7.12 triliun. Dengan capaian pada tahun 2020 ini, ke depannya nilai realisasi investasi DPMPTSP Kota Bandung perlu terus ditingkatkan guna menciptakan stabilitas perekonomian di Kota Bandung.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Instansi Lainnya yang Sejenis

Belum ada instansi lain yang sejenis yang menargetkan rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan maka data realisasi kinerja belum bisa dibandingkan dengan instansi lain.

Analisis Efisiensi

Untuk mencapai sasaran strategis “Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi”, diperlukan realisasi dana sebesar Rp 3.195.509.545,00, atau 91,92% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp 3.476.556.289,00. Realisasi kinerja sasaran strategis mencapai 161,3% lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang hanya mencapai 91,92% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien. Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target, diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10.

Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi	nilai investasi berskala nasional	323,25%	91,92%	231,33%

PENGUKURAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,19	80,43	100,30%
		Rata-rata Waktu Layanan Izin	7 hari kerja	3 hari 20 jam 18 menit 41 detik	157,14%
		Rata-rata Waktu Respon Penyelesaian Pengaduan	3 jam	1,55 jam	148,33%
2	Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional	Rp. 5.65 triliun	Rp. 18.263.474.155.264	323,25%

Jumlah Anggaran Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp. 16.995.161.484.00,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019 : Rp. 13.012.082.938.00,-

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2020 dicapai melalui pelaksanaan 4 program dan 13 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 11.035.445.420,- dan realisasi sebesar Rp 7.708.338.922,-.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, anggaran dan realisasi anggaran per program tahun 2020 DPMPSTP Kota Bandung sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pelayanan Perizinan	6.197.084.030	4.168.759.000	67,27
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.083.268.040	2.993.677.008	97,09
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.868.448.028	2.304.867.008	80,35
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.000.000	5.200.000	65,00
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.740.446.135	1.133.429.560	65,12
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2.521.023.756	1.907.972.610	75,68
8	Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi	576.891.495	498.177.752	86,36
	TOTAL	16.995.161.484	13.012.082.938	76,56

3.4. PRESTASI

Disamping capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana telah dipaparkan dibelakang, DPMPTSP Kota Bandung juga telah meraih beberapa penghargaan, diantaranya adalah:

1. Juara 2 Sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Klaster Kota pada Penganugerahan Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru dan Aman Covid 19



2. Penghargaan sebagai Predikat Baik dari Kemenpan RB dari Sisi Perizinan dan Kebutuhan Pelayanan Publik



3. Penghargaan Indonesia Tourism, Trade Investment, and Industry Award 2020 untuk Kategori Indonesia Investment Award



4. Penghargaan Public Service Of The Year Provinsi Jawa Barat 2020 Dalam Acara Indonesia Marketeers Festival (IMF)



- Juara Pertama Dalam Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Pemerintah dan Swasta di Kota Bandung



 **dpmptsp.bdg**

♡ 🔍 📌 ⋮ 📖

👤 Disukai oleh **evadev7814** dan **61 lainnya**

dpmptsp.bdg DPMTSP Kota Bandung meraih Juara pertama dalam Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Pemerintah dan Swasta di Kota Bandung, yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Senin (23/11/20).

- Penghargaan Top 32 Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) Tahun 2020



 **dpmptsp.bdg**

♡ 🔍 📌 ⋮ 📖

👤 Disukai oleh **evadev7814** dan **45 lainnya**

dpmptsp.bdg Alhamdulillah... DPMTSP Kota Bandung meraih penghargaan TOP 32 Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) Tahun 2020.

Anugerah Inovasi Jawa Barat Tahun 2020 tersebut dilaksanakan di The Trans Luxury Hotel Bandung, Selasa (15/12/20). Hadir menerima penghargaan tersebut, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.

- Penghargaan sebagai Public Services of The Year Provinsi Jawa Barat 2019 yang dinilai oleh MarkPlus, Inc bekerjasama dengan majalah Marketeers



- Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



9. Apresiasi dan penghargaan sebagai Unit Kerja Penerima Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2019



10. Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “A” urutan ke 5 (Nasional) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



11. Penghargaan predikat Zona Hijau (tingkat kepatuhan tinggi) dari OMBUDSMAN RI (ORI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan Keputusan Nomor : 4.118/ORI-KPP/VII/2014, Tanggal 23 Januari 2014.

12. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tanggal 18 Juli 2014 dari OMBUDSMAN RI (ORI).

13. Penghargaan predikat Zona Hijau (tingkat kepatuhan tinggi) Tahun 2014 OMBUDSMAN RI (ORI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.



14. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2014 OMBUDSMAN RI (ORI).
15. Fasilitator dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dan/atau Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum
16. Terpenuhinya seluruh standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI, dengan skor 1000 (*hasil self assesment*)
17. Penghargaan Eco office 2016
18. Penghargaan *investment award* aplikasi GAMPIL Tahun 2017





Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2020 ini disusun sebagai alat untuk melaksanakan laporan kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, untuk selanjutnya diajukan kepada Bapak Wali Kota Bandung dan pihak lain yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi.

Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu. Mengingat dukungan teknologi informasi sangatlah penting untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu yang memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan tingkat kecermatan yang memadai ;
4. Perbaikan sistem pengendalian internal. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian;
5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun

vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;

6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset .

Pada tahun 2020 DPMPTSP mendapatkan penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2019. Penghargaan tersebut dianugerahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Bulan November Tahun 2019 sebagai bentuk apresiasi terhadap pelayanan DPMPTSP Tahun 2019. Prestasi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2020 ini masih jauh dari harapan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan di masa mendatang sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kota Bandung **"Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis"** setiap tahun senantiasa dapat tercapai.

Bandung, 29 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PTSP
Drs. ROHMAT AHMAD NURUDIN
Kabidya Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680312 198709 1 001

